

ISSN 0216-9517

Volume XXXV/Nomor 2/ Juli - Desember 2011

# Mimbar Studi

## Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman

---

**Iding Bahruddin**

*Paradigma Peran Negara dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan*

**Dody S. Truna**

*Prasangka Sosial Berlatar Sentimen Agama*

**Erni Isnaeniah**

*Ideologi Politik Perempuan Islam*

**Ramdani Wahyu**

*Problem dan Prospek Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*

**Sarbini**

*Pendidikan Islam: Antara Idealita dengan Realita*

**Muntasir**

*Perkembangan Studi Kritik Hadits*

**Djaswid Al Hamdani**

*Pendekatan Penanaman Nilai dalam Pendidikan Budi Pekerti*

**Murip Yahya**

*Istiqomah dan Ciri Kepribadian Muslim*

**Bahrin Rifa'i**

*Harmonisasi Hukum*

**A. Rusdiana**

*Strategi Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di PTAIS*

---

Diterbitkan oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

# **Mimbar Studi**

Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman

# Mimbar Studi

Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
SUSUNAN DEWAN PENGURUS

---

Penanggungjawab	Nanat Fatah Natsir
Penyunting Ahli	1. Afif Muhammad (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 2. A. Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 3. Dadang Kahmad (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 4. Moh. Najib (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Editor	1. Dody S. Truna 2. Deden Effendi 3. Yusuf Wibisono 4. Murip Yahya 5. Ramdani Wahyu
Tata Usaha	1. Nurul Badriyah 2. Iman Supratman
Alamat	Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung Telp. (022) 7800528 Fax. (022) 7803936

---

Mimbar Studi terbit dua kali dalam setahun, berisi tentang kumpulan tulisan berupa gagasan, teori, metode, model, dan pendekatan baru dalam bidang ilmu agama dan lintas bidang ilmu. Dasar penerbitan SK Menpen RI No. 1646/SK/Ditjen PPG/STT/1990 Tanggal 1 Mei 1990.

Redaksi menerima tulisan yang relevan sebanyak 25 halaman kuarto dengan sistem footnote, satu spasi dengan font 12 Garamond, termasuk abstrak, kata kunci, daftar pustaka dan data diri penulis dalam aplikasi Microsoft Office Word. Redaksi berhak mengubah, memperbaiki susunan kalimat, tanpa mengubah isi karangan yang dimuat.

# Mimbar Studi

Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman  
Volume XXXV, Nomor 2, Juli - Desember 2011  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

## DAFTAR ISI

---

127-142	<b>Iding Bahruddin</b> <i>Paradigma Peran Negara dan Peluang Partisipasi Politik Gerakan Perempuan di Indonesia</i>
143-154	<b>Dody S. Truna</b> <i>Prasangka Sosial Berlatar Sentimen Agama</i>
155-168	<b>Erni Isnaeniah</b> <i>Ideologi Politik Perempuan Islam: Membangun Kesadaran Identitas Peran Politik Perempuan Islam Indonesia</i>
169-188	<b>Ramdani Wahyu</b> <i>Problem dan Prospek Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia</i>
189-204	<b>Sarbini</b> <i>Pendidikan Islam: Antara Idealita dengan Realita (Kajian Studi Kehendak Allah Melalui Asma Al-Husna dan yang Dilaksanakan Manusia)</i>
205-214	<b>Muntasir</b> <i>Perkembangan Studi Kritik Hadits</i>
215-222	<b>Djaswidi Al Hamdani</b> <i>Pendekatan Penanaman Nilai dalam Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah</i>
223-232	<b>Murip Yahya</b> <i>Istiqomah dan Ciri Kepribadian Muslim</i>
233-244	<b>Bahrin Rifa'i</b> <i>Harmonisasi Hukum</i>
245-258	<b>A. Rusdiana</b> <i>Strategi Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi di PTAIS</i>

---

# STRATEGI MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

A. Rusdiana

*Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

## Abstraksi

Prospek perguruan tinggi agama Islam di Indonesia, baik swasta maupun negeri dalam konteks internasionalisasi pendidikan akan mampu eksis dan survive dalam kompetisi internasional di era globalisasi, manakala didukung dengan manajemen pendidikan tinggi yang berorientasi pada pengembangan mutu akademik berskala internasional, akuntabilitas aplikasi pendidikan tinggi Islam yang disupport oleh seluruh stakeholder, dan humanistic sense of diversity harus menjadi primary supporting PTAI dalam rangka internasionalisasi pendidikan Islam yang lebih humanis dan international academic networking yang luas untuk mendukung SDM dalam negeri menjadi lebih unggul. Sedangkan upaya pengembangan dan peningkatan manajemen mutu PTAIS melalui tiga pendekatan; perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu.

**Kata-kata kunci:** Akuntabilitas, Otonomi, Akreditasi, Kompetensi.

## Abstract

The prospect of Islamic university in Indonesia, both private and state in the context of education internationalization will be able to be exist and survive in international competition in globalization era, when supported by university management which is oriented to international academic quality development, accountability of Islamic university application which is supported by all stakeholders, and humanistic sense of diversity must be primary supporting PTAI in order to Islamic Education internationalization in more humanist and broad international academic networking to support better domestic human. While the effort of PTAIS quality development and improvement through three approaches; quality planning, quality controlling, and quality improvement.

**Key words:** Accountability, Autonomy, Accreditation, Compensation

## A. PENDAHULUAN

Era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas. Maka perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu, bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. Para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya mengharapkan hasil dari komunikasi dan motivasi ganda yaitu ilmu pengetahuan, gelar, ketrampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku luhur serta dalam arti seimbang. Semuanya itu diperlukan sebagai persiapan memasuki dunia kerja dan atau persiapan membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan lahir. (Sufyarma, 2004: 161).

Seiring dengan derasnya arus persaingan/kompetisi global di dunia pendidikan tinggi pada milenium ketiga ini membuat banyak perguruan tinggi terutama PTAI di Indonesia acapkali kesulitan untuk mengikuti perkembangannya, terutama Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang notabene secara kualitas dan instrumentasi pendidikannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Dampaknya, banyak di antara mereka yang mengalami nasib yang mengesankan, atau 'gulung tikar'.

Realitas itu selanjutnya membawa dampak yang luar biasa terhadap munculnya image kesenjangan kualitas antara PTN dan PTS yang pada akhirnya memunculkan pandangan dikotomis bahwa PTN merupakan perguruan tinggi yang memiliki mutu yang lebih baik daripada PTS. Kondisi ini membuat

masyarakat lebih percaya dan cenderung memilih PTN umum (contoh ITB, UI, UGM dan lain sebagainya) dibanding dengan perguruan tinggi Islam (contoh UIN), apalagi bila dibandingkan dengan perguruan tinggi internasional, baik di dalam maupun diluar negeri seiring dengan arus liberalisasi pendidikan dunia, sektor *row out put* pendidikan tinggi PTAI di Indonesia sangat jauh tertinggal. Realitas itu menuntut kerja keras PTAI untuk mengembalikan *the golden age of Islam* di Indonesia, dalam bahasa Abdurrahman Mas'ud (2001: 13) sebagai kiblat Negara muslim terbesar di dunia. Minimal mampu berkancah di level Asia

Alasan ini berdasarkan pada fenomena dan kenyataan di lapangan bahwa PTAI selalu kalah bersaing dalam menghasilkan *out put* yang siap dipakai. Buktinya, hampir 43% lulusan PTAI tiap tahunnya tidak mampu terserap oleh dunia kerja, baik di sektor publik maupun nonpublik (Ahmad Rivan, 2005) Meminjam bahasa Mark Haynes Daniel (2002: 34), *scary but true*, menakutkan tetapi benar. Artinya kondisi demikian sangat memprihatinkan dan perlu perhatian yang serius dari PTAI di Indonesia. Belum lagi dewasa ini, PTAI di Indonesia (semisal UIN maupun STAIN) masih mempunyai dualisme paradigma, yaitu masih memisahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengetahuan agama. Adapun tuntutan masyarakat abad 21 sebagai masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*) menuntut setiap individu menguasai ilmu pengetahuan tanpa harus kehilangan nilai-nilai agama. Fenomena yang terjadi di Perguruan Tinggi Islam Negeri

ini juga terjadi pula pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swastanya.

Kondisi pendidikan tinggi yang sedemikian memprihatinkan itu semakin diperparah oleh fakta bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita yang masih rendah. Oleh sebab itu, sebenarnya kita patut khawatir terhadap kemampuan bersaing SDM kita di era globalisasi pada milenium ketiga ini. Betapa tidak, data yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Suyanto dan Djihad Hisyam, (2000: 4), menegaskan bahwa pada tahun 1996, kualitas SDM kita berada pada posisi yang sangat memprihatinkan, yaitu berada pada peringkat 102 dari 174 negara di dunia. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia makin terpuruk di posisi 112, di bawah Malaysia (61), Thailand (73), Filipina (84) dan Vietnam (108)

Laporan UNDP itu memuat angka indeks kualitas SDM (*Human Development Index-HDI*) yang mencakup 3 hal; tingkat pendidikan, kesehatan serta ekonomi rata-rata masyarakat.

Hasil laporan itu harus menjadi 'cambuk' bagi kita untuk terus secara simultan membenahi kondisi pendidikan tinggi Islam PTAI di negeri ini karena untuk menghadapi abad 21 ini yang salah satu cirinya ditandai dengan lahirnya suatu masyarakat *mega-kompetisi*, yaitu suatu masyarakat yang mampu berkompetisi dengan baik dan mempunyai kecesadaran global (*global consciousness*). Oleh karena itu, pembenahan pendidikan tinggi Islam terutama PTAIS menjadi suatu tuntutan yang mutlak untuk dilakukan menuju perubahankualitas serta eksistensi

lembaga pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini selaras dengan apa yang pernah dinatakan Kennedy (Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000: 22), "*Change is a way of life. Those who look to the past or present will miss the future.*" Artinya, dalam melakukan reformasi pendidikan harus berpegang pada tantangan masa depan yang penuh dengan persaingan global agar mampu berkompetisi secara baik.

Perguruan tinggi sebagai wadah untuk menggodog kader-kader pemimpin Bangsa memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan instansi non pendidikan, karena dalam wadah ini berkumpul orang-orang yang berilmu dan bernalar. Tanggung jawab pendidikan tidak saja beban pemerintah namun oleh seluruh lapisan masyarakat (Sufyarma, 2004: 190). Masalah penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana manajemen perguruan tinggi diatur dalam suatu administrasi yang rapi, efisien dan transparan.

Peraturan-peraturan akademik dan administrasi mempunyai tata kerja membentuk suatu sistem yang harus ditaati dengan disiplin dan dedikasi semua pihak. Dengan sistem seperti ini maka ada jaminan penuh bahwa perahu akan melaju ke arah yang sudah ditentukan walaupun nakhodanya berganti ditengah perjalanan. Prasarana dan sarana akademik harus diciptakan sebagai landasan berpijak, disamping landasan mutu perguruan tinggi ini terutama sangat ditentukan oleh peran tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas dan berbobot (Fadjar, 2005: 284).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hakikat Pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

#### a. Memaknai Pendidikan Tinggi

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No 20/2003) pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara".

Selanjutnya pada pasal (19) ditegaskan, bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Dan pada pasal 24 ayat (2) berbunyi bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Berkenaan dengan pendanaan, ayat (3) berbunyi perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Pendidikan tinggi, seperti halnya pendidikan dasar dan menengah, menurut UU Sisdiknas, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Ini artinya, masyarakat memiliki hak untuk mendirikan dan

mengelola perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kran dan peluang ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat sehingga perguruan tinggi swasta tersebut, menjamur di mana-mana. Persoalannya, seiring dengan kebebasan perguruan tinggi negeri membuka berbagai jurusan dan program studi, keberadaan perguruan tinggi swasta semakin terancam. Tak sedikit, perguruan tinggi swasta yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing memperebutkan mahasiswa.

Hakikat UU Sisdiknas diatas, mengandung aspek-aspek penting yang harus di perhatikan dalam pendidikan yaitu; aspek *cognitive*, *affective* dan *psychomotor*. Dengan kata lain program pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan (*cognitive*) tetapi juga menekankan pada pembinaan sikap dan pengembangan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu perguruan tinggi hendaknya menjadi institusi yang tidak hanya didominasi oleh nuansa pendidikan dan penelitian tapi juga seharusnya menjadi lembaga yang dapat membina sikap terpuji *civitas akademika* yaitu sikap menghindari tindakan kekerasan (*violence*) seperti aksi pemukulan atau penganiayaan dan tindakan ketidak jujuran akademis (*academic dishonesty*) seperti kasus penjiplakan (*plagiarism*), perjokian, dan cheating (*nyontek*).

Secara umum pendidikan tinggi terdiri dari dua jalur yaitu jalur akademik dan jalur kejuruan (*vokasi*). Jalur akademik adalah universitas, institute dan sekolah tinggi yang menawarkan stratafikasi gelar akademik dan spesialis (*higher degrees and specialist*) dan



mencakup program pendidikan S1 (gelar sarjana), S2 (gelar Magister), Spesialis dan S3 (gelar Doktor). Sedangkan Jalur kejuruan atau vokasi, umumnya menawarkan pendidikan kejuruan (vocational education) setingkat program diploma (ahli Madya). Pendidikan ini umumnya diselenggarakan oleh semua akademi yang ada di Indonesia minus akademi fantasi.

#### **b. Perguruan Tinggi Tinggi Agama Islam Swasta**

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS) pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan ahli-ahli agama Islam yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat serta untuk mengembangkan ilmu, teknologi, dan budaya Islam guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional (Arief Furchan, et.a 2005:6).

Upaya pembelajaran di PTAIS sendiri telah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pada bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Sejak itu telah terjadi dinamika dan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia berawal dari lahirnya STI yang kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta (Haidar Putra Daulay, 2004: 133).

Perubahan STI menjadi UII terjadi pada 1948, saat itu UII memiliki lima fakultas. Kemudian salah satu fakultas pada UII, yaitu Fakultas Agama diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan PP

Nomor 34 Tahun 1950 dan ditandatangani oleh Presiden I tertanggal 14 Agustus 1950. Menurut pasal 2 dari PP Nomor 34 Tahun 1950 tersebut, dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam bertujuan untuk memberi pelajaran tinggi dan menjadi pusat penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang agama Islam (Mahmud Yunus, 1979: 396).

Saat ini, perguruan tinggi Islam swasta, baik yang berbentuk universitas, institut ataupun yang lainnya telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini tidak hanya terlihat dari jumlah lembaga, tetapi juga terdapat pada jumlah jurusan dan program studi yang ditawarkan. Untuk itulah pemerintah membuat kebijakan bagi PTAIS terkait dengan jurusan dan program studi yang ditawarkan. Untuk fakultas keagamaan berada di bawah pengawasan Kopertais dan untuk fakultas non keagamaan berada di bawah kopertis (Haidar Putra Daulay, 2007: 141).

#### **c. Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pendidikan. Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan membahas mengenai

relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*). (Malik Fadjar, 2005: 286).

Hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan pembangunan tersebut, pendidikan akan dapat lebih mencapai hasil sesuai dengan misi dan fungsinya. Upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendidikan (proses belajar mengajar), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Dharma Pendidikan, perlu dievaluasi relevansi program dan jurusan yang ada dalam kebutuhan pembangunan, dalam arti apakah sumber daya manusia yang dihasilkan dapat diserap oleh kegiatan perekonomian dan pembangunan.

*Pertama*, mengenal adanya *raw-input* dan *instrumental-input*. *Raw input* merupakan peserta didik sedangkan *instrumental-input* terdiri dari: gedung, perpustakaan, pedoman akademik, dosen, kurikulum, metode dan lain-lain; *kedua*, *raw-input* dan *instrumental-input* masuk dalam proses, yang ini akan memakan waktu delapan (8) semester; *ketiga*, *output* (hasil didik) yang sesuai dengan kriteria institusi dan siap untuk masuk kedalam persaingan sumber daya manusia. Dosen merupakan instrumen yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena dari dosenlah perpindahan ilmu dilakukan kepada peserta didik (Azra, 2002: 29-37).

Perguruan tinggi yang memiliki tenaga-tenaga dosen yang berkualitas akan banyak diminati oleh masyarakat. Karena itu program untuk meningkatkan

kualitas para Dosen adalah merupakan kewajiban yang tidak ditawar-tawar lagi pada saat ini dan dimasa mendatang. Perguruan tinggi yang tidak mau mengikuti arusnya perkembangan perubahan sekarang dan dimasa datang akan ditinggalkan oleh masyarakat dan lambat atau cepat akan mengalami kemunduran, yang akhirnya akan mengalami keruntuhan.

Disisi lain, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kurikulum dibagi dalam kurikulum inti dan kurikulum lokal. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik, dalam penyelesaian suatu program studi. Disisi lain kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (Sufyarma, 2004: 144).

#### d. Manajemen Mutu sebagai Perangkat Obligatif Operasional Mutu Sistem Internasionalisasi Pendidikan Tinggi pada PTAIS di Indonesia

Kajian manajemen mutu ini merupakan bentuk penjabaran dari salah satu strategi pengembangan PTAIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu perbaikan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam di PTAIS. Kajian ini

diharapkan mampu mendeskripsikan secara lebih komprehensif akan elan vital manajemen yang berkualitas bagi eksistensi sebuah perguruan tinggi. Edward Salis (2001: 53-55), menegaskan bahwa manajemen mutu pendidikan akan sangat membantu institusi pendidikan setidaknya untuk 3 hal penting; *pertama*, manajemen mutu akan memperkuat sistem pengelolaan perguruan tinggi menjadi lebih baik. *Kedua*, dengan manajemen mutu, PTAIS akan mampu menghasilkan produk pendidikan tinggi Islam yang lebih unggul dan kompetitif. *Ketiga*, dengan manajemen mutu, PTAIS di Indonesia akan lebih *established* dalamengaruhi roda kompetisi pendidikan tinggi, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

## 2. Strategi dan Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam dalam Aplikasi Internasionalisasi PTAIS di Indonesia

Untuk mewujudkan *international qualified Islamic higher education*, dalam konteks internasionalisasi pendidikan di era globalisasi saat ini, PTAI di Indonesia harus memiliki strategi pengembangan pendidikan tingginya. Hal ini dimaksudkan agar PTAI di Indonesia mampu berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan global tanpa harus mengorbankan kepentingankepentingan nasional. Pandangan futuristik tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar mengingat internasionalisasi pendidikan tinggi di era globalisasi atau liberalisasi bermediasi melalui jalur pasar bebas yang sangat mungkin tidak hanya memberikan harapan untuk semakin *survive*, tetapi juga ancaman untuk semakin

menghancurkan roda pendidikan tinggi suatu negara, apalagi perangkap infrastruktur PTAI di Indonesia, terutama swasta masih jauh dari harapan. Alih-alih bukan kemajuan yang diperoleh, tetapi justru nasib harus "gulung tikar" tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi manakala tidak dimbangi dengan kesiapan internal PTAI serta dukungan kebijakan pendidikan Islam yang antipatif dalam merancang kebijakan sektor pendidikannya.

Pandangan tersebut simetris dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Robertson (James Ward, 2000: 14), bahwa internasionalisasi pendidikan sesungguhnya adalah *the third wave of globalization*, yang mampu menghantarakan suatu Negara memperoleh singgasana kedigdayaan dalam sektor tertentu, tetapi juga bisa menjerumuskan suatu Negara ke lubang kehancuran, atau hanya menjadi pecundang.

Dalam konteks itulah, ada beberapa strategi pengembangan pendidikan tinggi Islam pada PTAI di Indonesia yang dapat penulis tawarkan sebagai alternatif upaya strategis peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam di PTAI menjadi lebih baik untuk menghadapi internasionalisasi pendidikan yang akan datang.

### a. Perbaikan Manajemen Mutu Sistem Pendidikan Tinggi Islam

Perbaikan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam di PTAI segera dilakukan secara simultan dan kontinyu. Manajemen pendidikan tinggi yang berorientasi pada pengembangan *international quality academics* (mutu akademis berskala internasional). Hal ini penting karena kompetisi pendidikan

tinggi di era pasar bebas menuntut adanya standar mutu pendidikan yang lebih baik, yang mampu masuk ke segmen Negara manapun karena adanya *global agreement standar* yang memungkinkan hal itu terjadi, termasuk bagi negara berkembang seperti Indonesia sendiri. Manajemen sistem pendidikan yang lebih baik tersebut akan mendorong tumbuh dan berkembangnya SDM yang akan dihasilkan oleh PTAI di masa yang akan datang, sekaligus membantu memposisikan Indonesia dalam berbagai tingkat kompetisi, baik regional maupun internasional menjadi semakin baik. Tentunya kebijakan perbaikan manajemen system pendidikan tinggi tersebut tetap harus mempertimbangkan potensi daerah di mana PTAI tersebut berada.

Dengan paradigma *think locally act globally*, PTAI di Indonesia akan mampu mengakomodir perkembangan seluruh potensi yang ada, baik daerah, nasional maupun internasional dengan selalu berpijak pada platform *Islamic values morality* sebagai basis aplikasi pendidikan tingginya. Sebagai komparasi prestasi SDM Indonesia di sektor pendidikan untuk tingkat Asia dapat dicermati dalam bagan di bawah ini dimana Indonesia hanya mampu memposisikan dirinya diperingkat terendah, di bawah Jepang, Korea, Australia, Hongkong, bahkan Negara Thailand yang beberapa beberapa tahun yang lalu sempat menjadikan Indonesia sebagai salah satu kiblat pendidikannya

Upaya penguatan manajemen sistem pendidikan tinggi Islam pada PTAI di Indonesia perlu didukung oleh beberapa hal sebagai berikut; (1) implementasi jaminan mutu dan akreditasi dengan skala regional dan internasional.

Kebijakan ini perlu dilakukan jika PTAI di Indonesia benar-benar ingin survive dalam berkompetisi di era globalisasi. Kebijakan itu harus diiringi dengan *spirit of competitiveness* dengan menyiapkan SDM dan infrastruktur pendidikan tinggi Islam yang lebih baik. Upaya itu dapat dilakukan misalnya melalui kerjasama dengan badan jaringan perguruan tinggi regional seperti *Southeast Asia Ministry of Education Organization (SEMEO)* untuk mendorong realisasi akreditasi tingkat regional. Setelah upaya akreditasi regional dapat berjalan dengan baik, transisi ke arah akreditasi internasional sebagai prasyarat untuk memperlebar akses ke masyarakat internasional tidak akan sulit. (2) otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih matang dengan tetap memberdayakan potensi daerah. Hal ini dimaksudkan agar PTAI di daerah mampu secara lebih leluasa dalam mengelola lembaga pendidikan tingginya sesuai dengan potensi daerah serta peluang penyesuaian potensi yang ada dengan potensi internasional yang dapat dikembangkan melalui *international academic networking*, sehingga akan lebih mampu menyokong kiprah PTAI yang ada untuk bekerja dan menyiapkan segala sesuatunya secara lebih optimal. Hal ini penulis asumsikan karena PTAI di Indonesia secara keseluruhan memiliki karakteristik yang berbeda, baik negeri maupun swasta dan memiliki potensi daerah yang berbeda pula, serta problematika sekaligus *problem solving* yang tentunya sangat bervariasi. Oleh karena itu kebijakan otonomi kampus menjadi prasyarat yang mutlak harus dilakukan, yang tentunya tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dengan selalu berkoordinasi dengan

pemerintah pusat. (3) akuntabilitas aplikasi pendidikan tinggi Islam yang *disupport* oleh seluruh stakeholder. Akuntabilitas menjadi salah satu kunci sukses aplikasi pendidikan tinggi karena didalamnya adanya jaminan akan keterbukaan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Dengan adanya akuntabilitas, pendidikan tinggi Islam akan mampu mengikuti percepatan perkembangan dunia pendidikan. Ada *positive feedback* dari seluruh stakeholder untuk bersama sama memajukan PTAI dimana mereka saling berkepentingan (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001: 105-17). (4) kompetensi sumber daya infrastruktur dan SDM PTAI semakin ditingkatkan melalui kebijakan *resources improving* yang berkelanjutan. Kebijakan ini perlu dilakukan melalui berbagai upaya, baik internal maupun eksternal. Manakala PTAI yang bersangkutan tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk program itu, dapat disiasati dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang konsen terhadap pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, baik swasta maupun negeri yang tentunya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kebijakan itu perlu dikedepankan karena eksistensi sebuah organisasi di masa depan tidak hanya ditentukan oleh internal civitasnya saja, tetapi oleh faktor eksternalnya juga (Hanish Mc Rae, 1995: 79).

**b. Aplikasi Manajemen Mutu yang didukung oleh *Good Academic Atmosphere***

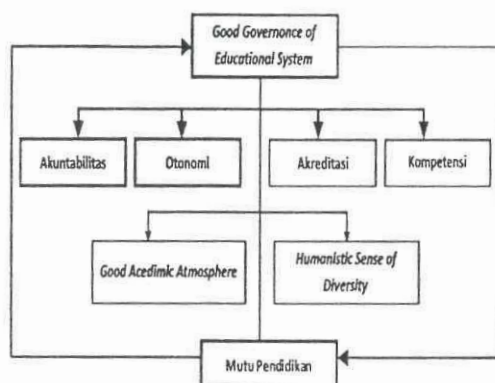
Aplikasi manajemen mutu harus didukung oleh *good academic atmosphere* sehingga upaya peningkatan mutu akademik dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Kondisi atmosfer akademis yang

baik akan lahir manakala didukung oleh kesadaran holistik seluruh civitas akademika akan urgensifitas mutu pendidikan tinggi Islamnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan budaya akademis yang lebih sehat dan kondusif dengan mengajak seluruh civitas akademika yang ada untuk bersamasama meningkatkan proses pembelajaran dan pendidikan yang lebih baik berdasarkan komitmen mutu yang diinginkan dan diharapkan oleh semua sivitas yang ada.

**c. *Humanistic Sense Of diversity* dijadikan *Primary Supporting PTAI***

Dalam rangka internasionalisasi pendidikan tinggi Islam yang lebih humanis dan *international academic networking* yang luas untuk mendukung SDM dalam negeri menjadi lebih unggul, inovatif dan produktif menjadi suatu keniscayaan sehingga ke depan PTAI dapat mereduksi pengangguran sekaligus menciptakan lulusan (*row out put*) yang kompetitif dalam berbagai skala kompetisi. Rasa kemanusiaan serta *diversity understanding* (pemahaman akan pluralitas) dalam dunia akademis mutlak diperlukan, agar pendidikan tinggi nantinya tidak hanya berorientasi pada materialisme, yang didominasi oleh kelas atas, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap pentingnya pengembangan sumber daya manusia masa depan yang potensial walaupun dari struktur ekonomi yang kurang mampu. Artinya ada peluang untuk memperoleh kesamaan pendidikan yang baik (*equality for getting good education access*) bagi putera-puteri negeri tercinta ini sebagai manifestasi calon pemimpin masa depan. Secara garis besar besar pemikiran

strategi pengembangan pendidikan tinggi Islam pada PTAI di Indonesia yang telah terdiskripsikan di atas dapat dipahami secara lebih sederhana melalui bagan kerangka pikir strategi pengembangan mutu sistem pendidikan di bawah ini;



Kerangka pikir strategi pengembangan mutu pendidikan tinggi Islam bagi PTAI tersebut merupakan satu kesatuan mata rantai yang saling mempengaruhi dan memiliki ketergantungan untuk saling mensupport agar dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka merealisasikan PTAI Indonesia yang kompetitif di era globalisasi pendidikan.

Dengan dukungan perangkat manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam yang lebih baik serta strategi pengembangan pendidikan tinggi yang matang dan tepat, PTAI di Indonesia akan memiliki prospek yang baik dalam berkompetisi tidak hanya di level nasional dan regional, tetapi juga di level internasional. Di samping itu juga, setidaknya PTAI di Indonesia akan memperoleh sejumlah academic profits, seperti halnya; semakin kokohnya kiprah dan eksistensi PTAI di tengah kompetisi global, semakin luasnya international networking yang dimiliki sebagai basis pengembangan akademik dan sosial

PTAI kepada masyarakat dan civitas akademiknya, serta meningkatnya mutu produk pendidikan tingginya yang diharapkan tidak hanya kompetitif dan produktif di berbagai level kompetisi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kultural kepada masyarakatnya sehingga ke depan diharapkan akan mampu mensupport kemajuan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Atau dengan kata lain, PTAI di Indonesia mampu mencetak *out put* (lulusan) guna to *preservational identity, to sustain and develop the intellectual and cultural base of the society, to give inspiration and pride to citizens, and to promote dialogue for respect of cultural and social diversity*

### 3. Upaya Pengembangan Dan Peningkatan Manajemen Mutu Sistem Pendidikan Tinggi Islam

Upaya pengembangan dan peningkatan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam bagi PTAIS di Indonesia dengan pendekatan *triple quality* yang dikembangkan oleh Juran, yang terkenal dengan konsep *Juran's Trilogy*, (Edward Sallis, 2001: 67-68); yang mencakup 3 komponen utama, yaitu;

#### a. *Quality Planning* (Perencanaan Mutu)

Perencanaan mutu merupakan tahapan untuk menentukan dan merancang segala perangkat pendidikan tinggi, baik infrastruktur maupun lainnya seperti misi, visi, program, kebijakan, serta sketsa tahapan proses yang akan dilalui untuk dirancang secara lebih matang dan komprehensif agar mampu menghasilkan pendidikan tinggi Islam yang lebih kompetitif dan produktif berdasarkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan aplikasinya.

Aspek *quality planning* menjadi penting dilakukan karena perkembangan PTAIS pada dasarnya juga menyesuaikan diri dari perkembangan masyarakat termasuk masyarakat global. Dengan kata lain, kebijakan yang dirancang adalah manifestasi dari kebutuhan dan keinginan masyarakat (*social need and desire*).

#### b. *Quality Control* (Pengendalian Mutu).

Tahapan ini juga penting karena pengendalian mutu pada dasarnya merupakan jaminan mutu yang ingin dihasilkan. Dengan adanya *quality control*, PTAI dapat memastikan proses implementasi manajemen pendidikan tingginya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan semula, baik menyangkut program pendidikan yang dijalankan, kurikulum, perangkat infrastruktur pendidikan tinggi, SDM, *out put* yang dirancang, maupun tingkat akselerasinya terhadap kompetisi dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja agar tetap eksis dan *survive*.

#### c. *Quality Improvement* (Peningkatan Mutu).

Tahapan ini merupakan upaya tindak lanjut dari proses pelaksanaan mutu dimana seluruh rencana akademis PTAIS yang telah dilaksanakan dievaluasi untuk kemudian dilakukan pembenahan secara simultan dan komprehensif guna memperbaiki kelemahan yang terjadi sebelumnya. Dengan peningkatan mutu berkelanjutan, eksistensi PTAIS di Indonesia akan lebih *appreciable* terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat global. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pengelolaan program pendidikan tinggi Islam dalam konteks internasionalisasi pendidikan sudah saatnya

memperhitungkan standar mutu sebagai basis peningkatan akselerasi *equality access* untuk bersaing berbagai tingkat kompetisi.

### C. PENUTUP

Internasionalisasi pendidikan tinggi ke depan bukanlah suatu ironi. Tetapi realitas kekinian yang sudah semakin mengarahkan *probability* itu menjadi suatu kenyataan. Namun, Indonesia yang didukung oleh PTAI yang begitu besar haruslah menyiapkan perangkat kompetitif pendidikan tinggi Islam sedini mungkin sehingga ke depan PTAI di Indonesia memiliki *good governance system* pendidikan tinggi yang unggul sehingga mampu berkompetisi di level internasional tanpa kehilangan *Islamic morality character* sebagai dasar aplikasinya. Dengan *academic support* yang lebih *seattle* (mapan) terutama di bidang infrastruktur pendidikan tingginya, prospek perguruan tinggi agama Islam di Indonesia, baik swasta maupun negeri dalam konteks internasionalisasi pendidikan akan mampu eksis dan *survive* dalam kompetisi internasional di era globalisasi saat ini.

Asumsi itu setidaknya harus didukung oleh strategi pengembangan mutu sistem pendidikan tinggi Islam yang lebih baik; *Pertama*, manajemen pendidikan tinggi di perguruan tinggi Islam harus mampu berorientasi pada pengembangan mutu akademik berskala internasional, sehingga *academic and social needs* untuk skala nasional dan regional sudah secara otomatis mampu dipenuhi. Penguatan manajemen itu harus didukung oleh; (1) implementasi akreditasi dengan skala regional dan internasional, (2) otonomi pengelolaan

pendidikan tinggi yang lebih matang, (3) akuntabilitas aplikasi pendidikan tinggi Islam yang *disupport* oleh seluruh stakeholder, sehingga seluruh pihak dapat berpartisipasi secara aktif untuk terus membenahi dan mengevaluasi *quality improvement* di PTAI yang ada, (4) kompetensi sumber daya infrastruktur dan SDM PTAI semakin ditingkatkan melalui kebijakan *resources improving* yang berkelanjutan. *Kedua*, aplikasi manajemen mutu harus didukung oleh *good academic atmosphere* sehingga upaya peningkatan mutu akademik dapat berjalan lebih cepat dan efektif. *Ketiga*, *humanistic sense of diversity* harus menjadi *primary supporting* PTAI dalam rangka internasionalisasi pendidikan Islam yang lebih humanis dan *international academic networking* yang luas untuk mendukung SDM dalam negeri menjadi lebih unggul, inovatif dan produktif menjadi suatu keniscayaan sehingga ke depan PTAI dapat mereduksi pengangguran sekaligus menciptakan lulusan (*row out put*) yang kompetitif dalam berbagai skala kompetisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mas'ud, dkk. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo: Semarang.
- Ahmad Rivani. (2005). *Strategi dan Prospek Pengembangan Mutu Lulusan PTAI di Indonesia*. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 23 Mei 2005.
- Arief Furchan, et.al., (2005) *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di PTAI* Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Edward dan Sallis, (2004), *Manajemen Kualitas Total Dalam Pendidikan (Total Quality Management in Education)* Penerjemah: Kambey Daniel C., Manado: Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.
- Eti Rochaety, dkk. (2005). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kreasindo Medicita.
- Fadjar, A. Malik. (2005). *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo.
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi*. Daerah. Yogyakarta; Depdiknas - Bappenas - Adicita.
- Haidar Putra Daulay, (2004). *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media,



- \_\_\_\_\_, (2007). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media,
- James Ward. (2000). *Reclaiming International Mindset of Education in Global Era*. Penguin Book: USA.
- Mahmud Yunus, (1979), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* Jakarta: Mutiara
- McRae, Hamish, (1995), *Dunia Di Tahun 2020*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Sufyarma. (2004). *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2001) *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah: strategi Pendidikan Nasional dalam era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Uhamka Ekspres.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.